

2022

Minggu ke-3 Juni
(17 s.d. 23 Juni 2022)

Isu Sepekan

Bidang Kesra, Komisi X



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MEMAJUKAN PARIWISATA RAMAH MUSLIM

Yulia Indahri

Peneliti Madya

yulia.indahri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Data menunjukkan, pada 2019 umat Islam di seluruh dunia menghabiskan total USD2,02 triliun untuk belanja makanan, kosmetik farmasi, fesyen, perjalanan, dan rekreasi. Pasar muslim global diperkirakan akan tumbuh hingga USD2,4 triliun pada tahun 2024. Sejumlah pengeluaran terbesar bagi konsumen muslim adalah pada makanan dan minuman halal.

Dalam pemeringkatan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) tahun 2022 dari 138 negara, Indonesia berbagi skor yang sama (skor 70) di posisi kedua dengan Saudi Arabia dan Turki. Posisi ini naik dibandingkan dengan pengukuran tahun 2021 yang berada di urutan keempat dunia. Malaysia tetap bertahan di posisi pertama seperti tahun sebelumnya.

Pemerintah terus berupaya agar Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam pengembangan wisata ramah muslim dunia. Saat ini, Kemenparekraf tengah merintis kerja sama dengan Arab Saudi. Ada keinginan membuka pasar wisata halal Indonesia di Arab Saudi, mengingat masyarakat Indonesia banyak yang melakukan perjalanan ibadah haji atau umrah.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, Kemenparekraf telah menyusun kebijakan terkait pariwisata halal. Dunia usaha juga sudah mempunyai panduan implementasi pariwisata halal berdasarkan Deklarasi Resolusi Halal Dunia hasil Kongres Halal Internasional yang diselenggarakan tanggal 14-18 Juni 2022 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan Kemenparekraf disusun dalam bentuk panduan yang dapat diikuti pengelola destinasi dan sentra ekonomi kreatif di daerah dalam menghadirkan layanan tambahan. Informasi dapat diakses melalui e-book pariwisata ramah muslim. Strategi yang dilakukan lebih mengedepankan kualitas pariwisata yang tak hanya terpaku pada jumlah wisatawan, melainkan lama tinggal dan biaya yang dihabiskan wisatawan saat berlibur.

Pariwisata halal bukan berarti Islamisasi wisata atraksi, melainkan memberikan layanan tambahan yang terkait dengan fasilitas, turis, atraksi, dan aksesibilitas untuk memenuhi pengalaman dan kebutuhan para wisatawan muslim.

Layanan tambahan disediakan oleh pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa sesuai dengan kategori halal, yang memenuhi standar:

- *Need to have*, seperti pelayanan makanan halal;
- *Good to have*, seperti toilet yang ramah pengguna bagi muslim; dan
- *Nice to have*, seperti fasilitas rekreasi yang ramah terhadap keluarga muslim.

2022

Minggu ke-3 Juni
(17 s.d. 23 Juni 2022)

Isu Sepekan

Bidang Kesra, Komisi X

Potensi wisata halal atau ramah muslim di Indonesia sangat besar. Selain destinasi unggulan seperti Sumatra Barat, Aceh, Jawa Barat, Lombok, Madura, dan Kalimantan Selatan, ada juga daerah lain yang ingin mengembangkan destinasi pariwisata halal. Contohnya pengembangan Desa Wisata Kubah Basirih di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melalui wisata ziarah. Kemenparekraf juga telah menjalin kerja sama dengan Masjid Istiqlal untuk mengembangkan Jakarta sebagai destinasi religi di Indonesia. Pemilihan Jakarta tak bisa dilepaskan dari lengkapnya fasilitas ramah muslim. Setidaknya ada 510 hotel dengan sertifikat halal dan 5 hotel tipe syariah di Jakarta.

Atensi DPR

Komisi X perlu terus mengingatkan Kemenparekraf agar selalu melibatkan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan pariwisata terkait guna tercapainya target menjadi pemimpin pengembangan wisata ramah muslim dunia.

Komisi X juga perlu mengingatkan Kemenparekraf bahwa kerja sama dengan negara lain atau pihak lain perlu dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi masyarakat yang menjadi pihak penyelenggara wisata. *Living culture* yang merupakan aset, jangan sampai tergerus globalisasi ketika ada kerja sama dengan pihak asing. Masyarakat penyedia jasa wisata sudah sepantasnya menjadi tuan rumah, dan bukan tamu di daerahnya sendiri karena kurangnya pengawasan terhadap implementasi perjanjian kerja sama.

Sumber

bisnis.tempo.co, 21 Juni 2022;
kemenparekraf.go.id, 22 Juni 2022;
kompas.com, 21 Juni 2022;
kompas.tv, 16 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

EDITOR

LAYOUTER



@puslitbkd_official

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

EKKUINBANG
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Edmira Rivani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

KESRA
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.